

**KETERCAPAIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERDASARKAN MISI PENDIDIKAN 5K:
KASUS KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TAHUN 2010/2011**

**(ACHIEVEMENT OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION BASED ON "5K"
EDUCATION MISSION: CASE STUDY ON NABIRE DISTRICT, PAPUA PROVINCE)**

**Ida Kintamani Dewi Hermawan
e-mail: idakintamani@yahoo.com**

Diterima tanggal: 09/04/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal: 1/12/2012, Disetujui tanggal: 10/12/2012

Abstrak: Tujuan analisis ini, yaitu untuk mengkaji hasil indikator pendidikan dan sejauh mana ketercapaian pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Nabire, Papua berdasarkan misi pendidikan, yaitu: ketersediaan; keterjangkauan; kualitas; kesetaraan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K). Hasilnya menunjukkan bahwa misi ketersediaan mencapai sebesar 90,73, termasuk kategori utama; misi keterjangkauan mencapai sebesar 89,94, termasuk kategori madya; misi kualitas mencapai sebesar 64,95 termasuk kategori kurang, misi kesetaraan mencapai sebesar 90,51 termasuk kategori utama; sedangkan misi kepastian memperoleh layanan pendidikan mencapai sebesar 98,13, termasuk kategori paripurna. Namun, bila dilihat menurut satuan pendidikan SD, SMP, dan SM tercapai masing-masing sebesar 88,61, 86,28, dan 85,25 termasuk kategori madya. Dapat dikatakan bahwa ketercapaian dikdasmen Kabupaten Nabire mencapai 86,85, termasuk kategori madya. Sekalipun demikian, perlu dilakukan pembenahan pada misi kualitas, karena hasil SD, SMP, dan SM sebesar 64,95 termasuk kurang. Untuk SD, perlu ditingkatkan persentase guru yang layak, ruang kelas baik, dan ketersediaan perpustakaan. Untuk SMP, perlu ditingkatkan persentase guru layak mengajar, angka lulusan, persentase ketersediaan perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium, sedangkan untuk SMA perlu ditingkatkan angka lulusan, persentase ketersediaan ruang kelas baik, ruang komputer, dan laboratorium.

Kata kunci: indikator pendidikan, Kabupaten Nabire, pendidikan dasar dan menengah; misi 5K (ketersediaan, keterjangkauan; kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan)

Abstract: The purpose of this analysis is to analyse the results of educational indicators and the extent of achievement of primary and secondary education in Nabire District, Papua Province based on education mission "5K". These are availability; affordability; quality; equivalency; and obtain educational services. The results show that the mission availability is achieved by 90.73 as a main category; mission affordability is achieved by 89.94 as a medium category; mission quality is achieved by 64.95 as a less category; mission equivalency is achieved by 90.51 as a main category; and obtain educational services is achieved by 98.13 as a perfect category. However, when viewed according to the level of education of the primary, junior, and senior secondary schools are achieved of 88.61, 86.28, and 85.25 respectively as medium category. Thus, it can be said Nabire District is achieved on basic and secondary education as a medium categories. However, the necessary improvements are in mission quality in primary, junior and senior secondary school due to only achieved 64.95 as a less category. Primary school needs to be improved in teacher quality, good classrooms, and library, junior secondary school in teacher qualities, graduate rates, libraries, and senior secondary school in graduate rates, good classrooms, computer rooms, and laboratories.

Keywords: educational indicator, Nabire District, basic and secondary education, K5 (availability, affordability, quality, equivalency, and obtain educational services education mission)

Pendahuluan

Dengan adanya perubahan Rencana Strategi Pendidikan dari tahun 2005-2009 menjadi tahun 2010-2014 menyebabkan terjadinya perubahan indikator pendidikan yang ada. Bila Rencana Strategi Pendidikan 2005-2009 menggunakan tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan seperti pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan tata kelola serta akuntabilitas pendidikan, maka Rencana Strategi Pendidikan 2010-2014 menggunakan Misi Pendidikan 5K (ketersediaan; keterjangkauan; kualitas; kesetaraan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan).

Pada Rencana Strategi Pendidikan 2005-2009 telah dirinci menjadi indikator pendidikan pada setiap pilar kebijakan. Namun, untuk Rencana Strategi Pendidikan 2010-2014 belum ada rincian Misi Pendidikan 5K dalam bentuk indikator pendidikan. Oleh karena itu, perlu disusun indikator pendidikan yang sesuai dengan Misi Pendidikan 5K tersebut, sehingga dapat diketahui seberapa jauh ketercapaian Misi Pendidikan 5K pada jenjang pendidikan yang ada.

Selain itu, pada tingkat internasional terdapat pengukuran pendidikan untuk semua (*Education for All Development Index/EDI*) dalam bentuk Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) yang juga berisi beberapa indikator pendidikan. Dalam pengukuran internasional, pendidikan dianggap berhasil bila memiliki nilai indeks yang dihitung dari komposit empat jenis indikator, yaitu: 1) angka partisipasi murni pendidikan dasar (APMD) usia 7-12 tahun; 2) angka melek huruf dewasa (AMHD) usia 15 tahun ke atas; 3) indeks segregasi gender yang dihitung dari rata-rata tiga indeks paritas gender angka partisipasi kasar (APK) SD, APK SMP, dan AMHD; dan 4) angka bertahan SD kelas 5.

Dengan adanya ketiga alasan di atas, perlu disusun ketercapaian pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K, tahun 2011 yang mengacu pada kondisi tersebut. Namun, ketercapaian pendidikan yang disusun dibatasi pada pendidikan dasar dan menengah dan khusus pada Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dirumuskan permasalahan kajian ini, yakni: 1) Bagaimana hasil indikator pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan 5K untuk Kabupaten Nabire,

Provinsi Papua?; dan 2) Bagaimana ketercapaian pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan 5K untuk Kabupaten Nabire, Provinsi Papua?

Dengan permasalahan tersebut, tujuan analisis ini difokuskan untuk mengetahui: 1) Hasil indikator pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Misi Pendidikan 5K untuk Kabupaten Nabire, Provinsi Papua; dan 2) Ketercapaian pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Misi Pendidikan 5K untuk Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

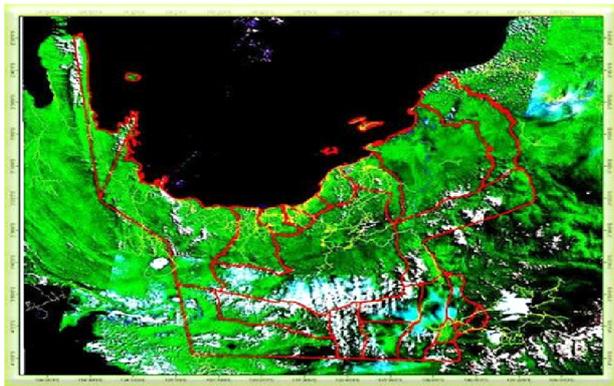
Kajian Pustaka dan Pembahasan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Untuk memahami tentang Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pertama kali perlu mengetahui besarnya daerah. Besarnya daerah disajikan pada Peta 1 Kabupaten Nabire. Selain itu, berdasarkan administrasi pemerintahan, di Kabupaten Nabire terdapat 12 kecamatan dan 81 desa/kelurahan, dengan luas wilayah 6.862 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 105.927 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 15,44 per km², sedangkan jumlah penduduk usia masuk SD usia 6-7 tahun sebanyak 4.483, usia 7-12 tahun sebanyak 12.457 anak usia 13-15 tahun sebanyak 6.691, usia 16-18 tahun sebanyak 7.992 orang. Proporsi penduduk usia masuk SD atau usia 6-7 tahun sebesar 4,23%, usia 7-12 tahun sebesar 11,76%, usia 13-15 tahun sebesar 6,32%, dan 16-18 tahun sebesar 7,54%, sedangkan penduduk usia lainnya sebesar 70,15%. Dengan demikian, usia sekolah di dikdasmen hanya dari usia 7-12 tahun sampai 16-18 tahun sebesar 25,62% atau 27.140 orang (PDSP, 2011a).

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Nabire dirinci menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu: 1) tidak pernah sekolah; 2) tidak/belum tamat SD; 3) tamat SD; 4) tamat SMP; 5) tamat SMA; 6) tamat SMK; 7) tamat Diploma; 8) tamat Sarjana; dan 9) tidak terjawab. Namun, tingkat pendidikan penduduk terbesar, yaitu tamat SD sebanyak 18.140 orang atau 34,25% sedangkan terkecil yaitu tamat Sarjana sebanyak 1.769 orang atau 3,34%.

Bila dilihat tingkat kependaian membaca dan menulis, maka penduduk Kabupaten Nabire yang dapat membaca dan menulis sebanyak 79.445



Gambar 1. Kabupaten Nabire

Sumber: google.com

orang atau 90,70%, sedangkan yang buta huruf mencapai 8.150 orang atau 9,30% dari 105.967 orang.

Penduduk yang dapat membaca/menulis di Kabupaten Nabire dirinci menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka yaitu mereka yang pernah maupun tidak pernah bekerja. Bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sebanyak 98.238 orang. Angkatan kerja sebanyak 79.445 orang atau 80,87% yang bekerja sebanyak 30.455 orang atau 31,00% dan pengangguran terbuka sebanyak 48.990 orang atau 49,87%. Bukan angkatan kerja sebanyak 18.793 orang dan terbesar adalah bersekolah sebesar 10.610 orang atau 10,80%, mengurus rumah tangga sebanyak 5.903 orang atau 6,01% dan terkecil adalah lainnya sebanyak 2.280 orang atau 2,32%.

Penduduk miskin di Kabupaten Nabire sebanyak 23.680 orang atau 22,36% dan berada di kota sebanyak 16.864 orang atau 15,92% lebih tinggi daripada di desa sebanyak 6.816 orang atau 6,43%. Keadaan alam dilihat dari curah hujan sebesar 33.070 mm dan hari hujan per tahun selama 16 hari.

Kondisi ekonomi Kabupaten Nabire dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp24.997 juta, PBB sebesar Rp21.727.641 ribu, APBD sebesar Rp473.660 juta, PDRB sebesar Rp79.743 ribu, dan pendapatan per kapita yang dihitung dari APBD dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya sebesar Rp4.471.573,00; sedangkan

upah minimum regional (UMR) sebesar Rp900.000,00. Biaya langsung untuk semua jenjang di Kabupaten Nabire sebesar Rp36.023.512. Dari anggaran tersebut, anggaran terbesar yaitu untuk SD sebesar Rp11.604.060 atau 32,21% dan terkecil yaitu untuk PNF sebesar Rp489.419 atau 1,36%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk bidang pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire prioritas diberikan pada satuan pendidikan SD. Hal ini dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan biaya untuk lainnya sebesar Rp11.097.634 atau 30,81% merupakan pengeluaran terbesar kedua.

Dari kondisi ekonomi, mata pencaharian penduduk Kabupaten Nabire dirinci menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu: 1) pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 2) pertambangan; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas, dan air; 5) bangunan; 6) perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; 7) angkutan, pergudangan, dan komunikasi; 8) keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, jasa perusahaan; serta 9) jasa kemasyarakatan. Mata pencaharian penduduk yang terbesar yaitu pada industri pengolahan sebanyak 18.140 orang atau 34,25%, sedangkan terkecil yaitu keuangan sebanyak 1.769 orang atau 3,34%. Dengan demikian, sektor industri pengolahan merupakan sektor primer di Kabupaten Nabire.

Kondisi sosial budaya dapat dilihat dari keagamaan dan kesehatan. Berdasarkan keagamaan, Kabupaten Nabire mempunyai enam agama yang dianut, yaitu 1) Islam; 2) Kristen Protestan; 3) Katholik; 4) Hindu; 5) Budha; dan 6) Khonghucu. Penduduk yang terbesar beragama Kristen Protestan sebesar 96.695 orang atau 45,75% dan beragama Budha yang terkecil sebesar 175 orang atau 0,08%. Berdasarkan kesehatan, Kabupaten Nabire memiliki 3 rumah sakit dan 20 puskesmas (BPS, 2011).

Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kedua Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk

sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat". Bagian Ketiga, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat". Dengan demikian, pendidikan dasar dan menengah yang dianalisis yaitu SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat, dan SM dan yang sederajat (Depdiknas, 2003).

Pendidikan dasar dan menengah dalam kajian ini, yaitu SD, MI, dan yang sederajat termasuk SDLB dan Paket A, SMP, MTs, dan yang sederajat serta SMPLB dan Paket B; SMA, SMK, MA, dan yang sederajat termasuk SMALB dan Paket C.

Misi Pendidikan 5K

Misi Pendidikan 5K merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010-2014 yang terdiri atas tiga pilar kebijakan. Misi 5K terdiri atas: 1) K1, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; 2) K2, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; 3) K3, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, 4) K4, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan 5) K5, menjamin kepastian memperoleh layanan Pendidikan (Kemdiknas, 2010a).

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan diperlukan penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur satuan pendidikan dan penunjang lainnya. Sebagai upaya untuk memperluas keterjangkauan, biaya pendidikan diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diharapkan dapat mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan, layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender harus tidak ada perbedaan. Dalam upaya menjamin kepastian,

diharapkan lulusan sekolah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/tentang-kemdikbud-visi>).

Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan 5K

Oleh karena sampai saat ini belum ada jenis indikator yang termasuk dalam setiap misi, maka indikator yang dimaksud dirancang sesuai dengan jenis indikator pendidikan yang telah ada selama ini. Indikator untuk Misi K1 ketersediaan layanan pendidikan terdiri atas 6 (enam) jenis, yaitu: 1) angka partisipasi murni (APM) atau angka partisipasi kasar (APK); 2) angka masukan murni (AMM) khusus SD dan angka melanjutkan (AM) untuk SMP dan SM; 3) rasio siswa per sekolah (R-S/Sek); 4) rasio siswa per kelas (R-S/K); 5) rasio siswa per guru (R-S/G); dan 6) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK) (PDSP, 2011a).

Untuk melihat seberapa jauh partisipasi pendidikan, digunakan APK/APM sebagai alat ukur. APK adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai, sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. Untuk usia SD digunakan penduduk usia 7-12 tahun, SMP digunakan penduduk usia 13-15 tahun, dan SM digunakan penduduk usia 16-18 tahun. Makin tinggi nilai APK, berarti makin banyak penduduk yang bersekolah. Sebaliknya, makin kecil nilai APK, makin sedikit penduduk yang bersekolah. Hal yang sama untuk APM; makin tinggi nilai APM, makin banyak penduduk yang bersekolah dengan usia yang sesuai dengan ketentuan, dan makin kecil nilainya, makin kurang yang sesuai usianya (PSP, 2010).

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang menjadi masukan SD digunakan alat ukur AMM. AMM SD adalah perbandingan antara siswa baru SD usia 6-7 tahun dengan penduduk usia 6-7 tahun. Makin tinggi nilai AMM, makin banyak penduduk usia masuk sekolah yang sesuai dengan ketentuan terserap di SD. Sebaliknya, makin kecil nilai AMM, makin sedikit penduduk usia sekolah yang sesuai dengan

ketentuan terserap di SD. Idealnya, nilai AMM adalah 50%, yang berarti semua anak usia 6-7 tahun telah masuk ke SD (PSP, 2010).

Untuk mengetahui siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, digunakan alat ukur angka melanjutkan (AM). AM ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah AM SMP dan AM SM. AM dihitung dengan menggunakan jumlah siswa baru tingkat I dibagi dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. AM SMP dihitung dari jumlah siswa baru tingkat I SMP dibagi dengan lulusan SD, AM SM dihitung dari jumlah siswa baru tingkat I SM dibagi dengan lulusan SMP. Makin tinggi nilai AM, makin banyak lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, makin kecil nilai AM, makin sedikit lulusan yang melanjutkan. Idealnya, nilai AM adalah 100% berarti semua lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (PSP, 2010).

Untuk mengetahui kepadatan sekolah digunakan R-S/Sek sebagai alat ukur. R-S/Sek adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio ini menunjukkan rata-rata siswa di setiap sekolah. Makin tinggi rasionya, berarti makin padat sekolah yang ada. Sebaliknya, makin kecil rasionya, berarti makin tersebar sekolah yang ada. Oleh karena itu, R-S/Sek pada jenjang pendidikan yang makin rendah akan makin kecil (Kemdiknas, 2010b).

Untuk mengetahui kepadatan kelas digunakan R-S/K sebagai alat ukur. R-S/K adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah rombongan belajar (kelas) sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio ini menunjukkan rata-rata siswa di setiap kelas. Makin tinggi rasionya berarti makin padat kelas yang ada. Sebaliknya, makin kecil rasionya berarti makin menyebar kelas yang ada. Oleh karena itu, R-S/K pada jenjang pendidikan yang makin rendah akan makin kecil (PSP, 2010).

Untuk mengetahui pelayanan guru kepada siswa digunakan R-S/G sebagai alat ukur. R-S/G adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio ini menunjukkan rata-rata siswa yang dapat dilayani oleh setiap guru. Makin tinggi rasionya berarti makin banyak guru melayani siswa. Sebaliknya, makin kecil rasionya berarti makin

sedikit siswa yang dilayani guru. Oleh karena itu, R-S/G pada jenjang pendidikan yang makin tinggi akan makin kecil karena menggunakan bidang studi sehingga makin banyak guru bidang studi (PSP, 2010).

Untuk mengetahui pendayagunaan ruang kelas digunakan R-K/RK sebagai alat ukur. R-K/RK adalah perbandingan antara jumlah rombongan belajar (kelas) dengan jumlah ruang kelas sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio ini menunjukkan rata-rata ruang kelas yang digunakan oleh rombongan belajar. Idealnya, rasionya 1 berarti setiap ruang kelas hanya digunakan sekali kegiatan belajar mengajar. Rasionya lebih dari 1 berarti makin banyak ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar-mengajar. Sebaliknya, rasio kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (PSP, 2010).

Indikator untuk Misi K2, keterjangkauan layanan pendidikan terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) tingkat pelayanan sekolah (TPS); 2) daerah terjangkau (DT); dan satuan biaya (SB). Indikator pertama TPS dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelayanan sekolah di setiap jenjang. TPS SD berbeda dengan TPS SMP dan SM. TPS SD dihitung dari jumlah penduduk usia sekolah dibagi dengan sekolah ekuivalen, TPS SMP dan SM dihitung dari jumlah lulusan dibagi dengan sekolah ekuivalen, untuk SMP lulusan SD dan untuk SM lulusan SMP. Sekolah ekuivalen dihitung dari jumlah rombongan belajar atau ruang kelas (diambil yang paling besar) dibagi dengan 6, artinya sekolah ekuivalen dengan 6 rombongan belajar/ruang kelas. Dengan demikian, bagi ruang kelas yang belum digunakan tetap dihitung menjadi daya tampung sekolah. Nilai TPS yang besar memiliki arti paling kecil pelayanan pendidikannya. Sebaliknya, makin kecil nilai TPS berarti makin besar pelayanan pendidikan.

Daerah terjangkau, yaitu dihitung daerah terjangkau anak dibagi dengan daerah terjangkau sekolah. Daerah terjangkau anak dihitung dari jari-jari lingkaran ($22/7$) dikalikan dengan jarak yang dapat dijangkau anak dan dikalikan dengan kepadatan penduduk usia sekolah. Daerah terjangkau sekolah dihitung dari jari-jari lingkaran ($22/7$) dikalikan dengan jarak yang

dapat dijangkau anak dan dikalikan dengan kepadatan sekolah. Kepadatan penduduk usia sekolah dihitung dari penduduk usia sekolah dibagi dengan luas wilayah, sedangkan kepadatan sekolah dihitung dari jumlah sekolah dibagi dengan luas wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15, Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (Permendiknas 15/2010), diketahui bahwa jarak yang dapat dijangkau siswa SD yaitu 3 (tiga) km², SMP 6 (enam) km² dan untuk SM ditentukan sebesar 10 km², karena belum ada SPM untuk SM. Dengan demikian, makin tinggi nilainya berarti makin tidak terjangkau. Sebaliknya, makin rendah nilainya berarti makin terjangkau (Kemdiknas, 2010b).

Satuan Biaya, yaitu dihitung dari biaya pendidikan yang berasal dari belanja langsung dibagi dengan jumlah siswa. Makin tinggi nilai SB berarti makin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, sebaliknya makin kecil nilai SB berarti makin kecil pula biaya pendidikan. Dengan demikian, makin tinggi SB, makin tidak terjangkau dan makin rendah SB berarti makin terjangkau.

Indikator untuk Misi K3 kualitas layanan pendidikan terdiri dari 9 (sembilan) jenis, yaitu 1) persentase siswa baru SD asal TK (%SB-TK); 2) persentase guru layak (%GL); 3) angka lulusan (AL); 4) angka mengulang (AU); 5) angka putus sekolah (APS); 6) persentase ruang kelas baik (%Rkb); 7) persentase perpustakaan (%Perpus); 8) persentase ruang komputer (%Rkom) dan 9) persentase Laboratorium (%Lab) (PSP, 2010).

Lima indikator berasal dari sumber daya manusia dan empat indikator berasal dari prasarana pendidikan. Khusus untuk SD, mutu masukan dapat dilihat dari banyaknya tamatan TK yang masuk SD, yaitu %SBI TK. Makin besar nilainya, berarti makin banyak siswa baru SD tingkat I yang berasal dari tamatan TK. Sebaliknya, makin kecil nilainya berarti makin sedikit yang berasal dari tamatan TK. Idealnya %SBI TK adalah 100% berarti semua siswa baru tingkat yaitu tamatan TK.

Persentase guru layak %GL dimaksud adalah guru yang memiliki ijazah sarjana atau diploma IV dan lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Depdiknas, 2005). Oleh karena itu, %GL dihitung

dari guru yang memiliki ijazah sarjana atau diploma IV dan lebih tinggi dibandingkan dengan guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Idealnya, %GL yaitu 100%, artinya semua guru memiliki ijazah sarjana atau diploma IV dan lebih tinggi. Kondisi makin mendekati 100% berarti makin baik, artinya makin tinggi nilainya berarti makin baik. Sebaliknya, makin kecil nilainya berarti makin sedikit guru yang berijazah sarjana atau diploma IV (Depdiknas, 2005).

Mutu yang berasal dari siswa, yaitu: AL, AU, dan APS. AL dihitung dari jumlah lulusan dibagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dan dinyatakan dalam persentase. Seperti halnya %GL, maka idealnya AL yaitu 100% berarti siswa tingkat tertinggi lulus semua dan makin mendekati 100% makin baik, artinya makin tinggi nilainya berarti makin baik. Sebaliknya, makin kecil nilainya berarti makin sedikit yang lulus.

AU dihitung dari jumlah mengulang dibagi dengan jumlah siswa tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase, sedangkan APS dihitung dari jumlah putus sekolah dibagi dengan jumlah siswa tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Berbanding terbalik dengan AL, maka AU dan APS idealnya 0%, artinya tidak ada siswa yang mengulang dan putus sekolah. Kondisi makin mendekati 0% makin baik, artinya makin rendah nilainya berarti makin baik. Sebaliknya, makin tinggi nilainya berarti makin buruk, karena makin banyak yang mengulang atau putus sekolah.

Mutu pendidikan berasal dari prasarana yang dimiliki, yaitu %Rkb, %Perpus, %Rkomp, dan %Lab yang menunjang kegiatan belajar mengajar. %Rkb dihitung dari jumlah ruang kelas yang baik dibagi dengan ruang kelas seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. %Perpus dihitung dari jumlah perpustakaan yang dimiliki dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dan dinyatakan dalam persentase. %Rkomp dihitung dari jumlah ruang komputer yang dimiliki dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dan dinyatakan dalam persentase. %Lab dihitung dari jumlah laboratorium dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dan dinyatakan dalam persentase. Khusus %Lab SM karena ketentuannya harus memiliki 5 jenis laboratorium maka cara menghitungnya yaitu jumlah laboratorium dibagi dengan jumlah sekolah

dikalikan 5 dan dinyatakan dalam persentase. Seperti halnya %GL dan AL maka %RKB, %Perpus, %Rkom, dan %Lab idealnya yaitu 100%, artinya semua sekolah memiliki ruang kelas yang baik, memiliki perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium yang cukup. Kondisi makin mendekati 100 berarti makin baik. Sebaliknya, makin kecil nilainya berarti makin sedikit prasarana yang dimiliki (PSP, 2010).

Indikator untuk Misi K4 kesetaraan dalam memperoleh pendidikan terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) perbedaan gender (PG) APK; 2) indeks paritas gender (IPG) APK; dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt).

Perbedaan Gender (PG) APK dihitung dari APK laki-laki dikurangi APK perempuan. Cara menghitung APK laki-laki, yaitu jumlah siswa laki-laki dibagi dengan penduduk laki-laki sesuai dengan jenjang pendidikan. Hal yang sama untuk menghitung APK perempuan, yaitu siswa perempuan dibagi dengan penduduk perempuan sesuai dengan jenjang pendidikan. Nilai PG yang ideal adalah 0 berarti tidak ada perbedaan gender, dimana nilai mendekati 0 makin baik. IPG APK dihitung dari APK perempuan dibagi dengan APK laki-laki. Nilai IPG yang ideal adalah 1, sedangkan nilai 0,99 atau 1,01 memiliki arti yang sama, yaitu mendekati seimbang. Nilai 0,99 berarti laki-laki lebih diuntungkan, sedangkan nilai 1,01 berarti perempuan lebih diuntungkan. Makin jauh dari angka 1 berarti makin tidak seimbang. %S-Swt, dihitung dari siswa yang bersekolah di sekolah swasta dibagi dengan jumlah siswa sekolah negeri ditambah dengan sekolah swasta dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya berarti makin tinggi partisipasi swasta. Sebaliknya, makin rendah nilainya berarti makin rendah partisipasi swasta.

Indikator untuk Misi K5 kepastian memperoleh layanan pendidikan terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu: 1) koefisien efisiensi (KE); 2) angka bertahan (AB); 3) rata-rata lama belajar (RLB); dan 4) tahun masuk per lulusan (TML) (PSP, 2010).

Keempat ukuran tersebut menggunakan kohort 1.000 siswa, sehingga bila sekolah efisien maka dari kohort 1.000 siswa akan terjadi 1.000 siswa pula yang lulus. Idealnya untuk KE dan AB yaitu 100%, berarti tidak ada siswa yang mengulang dan putus sekolah. Dengan demikian,

makin mendekati nilai 100% berarti kondisi sekolah makin efisien. RLB dan TML untuk tingkat SD seharusnya 6 tahun, karena tingkat SD memiliki 6 tingkat dan bila setiap tahun naik tingkat, maka dalam waktu 6 tahun siswa SD akan lulus. Hal yang sama untuk SMP dan SM seharusnya adalah 3 tahun, karena SMP dan SM memiliki 3 tingkat dan bila setiap tahun naik tingkat maka dalam waktu 3 tahun siswa SMP dan SM akan lulus. Dengan demikian, idealnya SD 6 tahun, sedangkan SMP dan SM 3 tahun, sehingga dapat dikatakan kondisi sekolah makin efisien.

Indikator pendidikan dari misi K1 sampai K5 menggunakan satuan yang tidak sama seperti persentase, siswa, kelas, rupiah, indeks, dan tahun. Indikator Misi K1 memiliki satuan persentase, siswa, dan kelas. Indikator Misi K2 memiliki satuan siswa dan rupiah. Untuk Indikator Misi K3 satuan yang digunakan semuanya yakni persentase. Indikator Misi K4 memiliki satuan persentase dan indeks. Indikator Misi K5 menggunakan satuan persentase dan tahun. Dengan adanya perbedaan satuan di setiap Misi K5 maka digunakan standar yang terdapat pada Tabel 1 sehingga nilai masing-masing indikator bisa dibandingkan. Untuk menentukan standar indikator digunakan beberapa ukuran seperti standar ideal, Permendiknas No. 15/2010, UU No.14/2005 atau nilai rata-rata indikator di tingkat nasional (Kemdiknas, 2010b; Depdiknas, 2005).

Dalam standar yang terdapat pada Tabel 1, terdapat 16 indikator pendidikan yang memiliki standar ideal, sedangkan indikator lainnya belum ada idealnya. Indikator yang menggunakan standar ideal, yaitu AM, R-K/RK, %GL, AL, AU, APS, %RKB, %Perpus, %Rkomp, %Lab, PG APK, IPG APK, KE, AB, RLB, dan TML. APK SD menggunakan angka nasional. R-S/Sek menggunakan ketentuan rata-rata kelas 28 untuk SD dan 32 untuk SMP dan SM, R-S/G tiap guru melayani anak menggunakan angka nasional, R-S/K sesuai dengan Permendiknas No.15/2010, TPS dan DT menggunakan Permendiknas No.15/2010 dan ketentuan khusus, SB menggunakan ketentuan BOS yang hanya dapat memenuhi 60%, %S-Swt menggunakan angka nasional.

Ketercapaian berdasarkan standar indikator pada Tabel 2 diberikan klasifikasi sama dengan klasifikasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

Tabel 1. Standar Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi K5

Misi	No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Misi K1	1	APK (%)	115	100	100	100
	2	AMM/AM (%)	50	100	100	
	3	Rasio S/Sek	240	360	480	
	4	Rasio S/G	18	12	10	
	5	Rasio S/K	28	32	32	
	6	Rasio K/RK	1	1	1	1
Misi K2	1	TPS	150	100	100	
	2	DT	168	288	384	
	3	SB	667,000	958,000	1,200,000	
Misi K3	1	%GL	100	100	100	100
	2	AL (%)	100	100	100	100
	3	AU (%)	0	0	0	0
	4	APS (%)	0	0	0	0
	5	% RKb	100	100	100	100
	6	%Perpustakaan	100	100	100	100
	7	%Komputer		100	100	100
	8	%Laboratorium		100	100	100
Misi K4	1	PG APK	0	0	0	0
	2	IPG APK	1	1	1	1
	3	%S-Swt	10	40	50	
Misi K5	1	KE (%)	100	100	100	100
	2	AB5/AB (%)	100	100	100	100
	3	RLB	6	3	3	
	4	TML	6	3	3	

Sumber: Profil Dikdasmen 2010/2011 (PDSP, 2011b).

yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang.

Tabel 2. Standar Indikator Pendidikan Menurut Jenis Kinerja

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Paripurna	95.00 ke atas
2	Utama	90.00-94.99
3	Madya	85.00-89.99
4	Pratama	80.00-84.99
5	Kurang	Kurang dari 80.00

Sumber: Profil Dikdasmen 2010/2011 Buku 3 (PDSP, 2011b).

Hasil Analisis dan Pembahasan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977 tentang Kordinasi Pengolahan Data di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menjelaskan tentang beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data di Depdikbud. Salah satu kegiatannya yaitu analisis data. Analisis data didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mempelajari dan meneliti data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan analisis data, yaitu terdapat: 1) data yang dianalisis, baik dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk lainnya; 2) kegiatan yang secara sadar untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, dan membandingkan data yang satu dengan data lainnya; dan 3) interpretasi secara

deskriptif untuk menarik simpulan dari kegiatan meneliti, memeriksa, mempelajari, dan membandingkan data yang satu dengan data lainnya. (Depdikbud, 1977).

Analisis berdasarkan indikator pendidikan menghasilkan kinerja dikdasmen menggunakan Misi Pendidikan 5 K. Misi K1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit enam indikator. Misi K2 memperluas keterjangkauan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit tiga indikator. Misi K3 meningkatkan kualitas/mutu layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit delapan indikator. Misi K4 mewujudkan kesetaraan dalam layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit tiga indikator. Misi K5 menjamin kepastian layanan tercapai menggunakan komposit empat indikator. Masing-masing misi K1 sampai K5 memiliki nilai antara 1-100. Angka 1 yang terburuk dan angka 100 yang terbaik. Kemudian rata-rata dari nilai misi K1 sampai K5 merupakan kinerja pendidikan.

Untuk mengetahui ketercapaian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Nabire, akan dijelaskan tentang dua variabel yang menjadi tujuan, yaitu: 1) hasil indikator pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan 5K dan 2) ketercapaian pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan 5K.

Data dikdasmen yang disajikan pada Tabel 3 diuraikan menjadi 12 variabel data pada tahun 2010/2011. Sebanyak 6 (enam) variabel pertama

adalah prasarana yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium, sedangkan 6 variabel berikutnya adalah sumber daya manusia seperti siswa baru tingkat I, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah. Dari ke-12 variabel data tersebut dapat dihasilkan indikator berdasarkan Misi Pendidikan 5K.

Hasil Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan 5K

Misi K1 Ketersediaan Layanan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 4 APM SD sebesar 130,67% sudah melebihi ideal, SMP sebesar 64,53% dan SM sebesar 53,34% sehingga dikdasmen sebesar 91,59%. Berdasarkan perhitungan APK, ternyata APK tertinggi juga terdapat di SD sebesar 164,68%, sedangkan yang terendah di SM sebesar 77,85% sehingga dikdasmen sebesar 121,41% telah melebihi 100%. Lebih rendahnya APK di SM menunjukkan partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan jenjang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat SMP dan tingkat SM karena anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi. Namun, untuk jenjang SD perlu diperhatikan penduduk usia sekolahnya yang mungkin lebih rendah daripada kenyataannya.

Tabel 3. Data Dikdasmen Berdasarkan 12 Variabel Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Sekolah	100	32	29	161
2	Rombongan Belajar	828	197	189	1,214
3	Ruang Kelas	713	245	198	1,156
4	Perpustakaan	34	18	11	63
5	Ruang Komputer	0	11	13	24
6	Laboratorium	0	24	30	54
7	Siswa Baru	4,016	2,222	2,316	8,554
8	Siswa	20,514	6,216	6,222	32,952
9	Lulusan	2,006	1,601	1,620	5,227
10	Guru	739	347	333	1,419
11	Mengulang	84	40	42	166
12	Putus Sekolah	20	34	116	170

Sumber: Profil Dikdasmen 2010/2011 Buku 3. (PDSP, 2011b)

Tabel 4. Indikator Misi K1 Ketersediaan Layanan Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	APM	130.67	64.53	53.34	91.59
2	APK (%)	164.68	92.90	77.85	121.41
3	AMM/AM (%)	78.20	110.77	144.66	
4	Rasio S/Sek	205	194	215	205
5	Rasio S/G	28	18	19	23
6	Rasio S/K	25	32	33	27
7	Rasio K/RK	1.16	0.80	0.95	1.05

AMM SD sudah lebih dari ideal sebesar 78,20%. Besarnya AMM ini menunjukkan bahwa orang tua telah memprioritaskan anaknya untuk bersekolah di SD dan dalam usia yang sesuai. Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP yaitu 110,77% sudah baik, karena telah melebihi 100%. Demikian juga lulusan SMP yang melanjutkan ke SM sebesar 144,66% telah melebihi ideal. Besarnya AM tingkat SMP dan SM juga akibat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya walaupun jumlah sekolah di tingkat SMP dan SM yang ada belum cukup memadai seperti halnya dengan tingkat SD. Namun, kondisi di Kabupaten Nabire agak berbeda karena AM ke SMP dan SM lebih dari 100%. Hal ini disebabkan adanya siswa dari daerah lain yang bersekolah di Kabupaten Nabire atau sekolah terletak di daerah perbatasan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa SMP dan SM di Kabupaten Nabire termasuk sekolah favorit dengan melihat banyaknya siswa yang melanjutkan ke SMP dan SM di Kabupaten Nabire.

R-S/Sek di Kabupaten Nabire sangat bervariasi antara 194 di SMP yang terjarang sampai 215 di SM yang terpadat dengan rata-rata dikdasmen sebesar 205. Sekolah yang dibangun untuk SD dan memiliki 6 ruang kelas, sehingga dapat menampung 240 siswa. Pada kenyataannya penggunaan ruang kelas SD sebesar 205 atau mencapai 85,48%. Bila SMP menggunakan tipe sekolah C yang memiliki 9 ruang kelas, maka dapat digunakan untuk menampung 360 siswa. Pada kenyataannya penggunaan ruang kelas di SMP sebesar 194 atau mencapai 53,96%. Bila SM menggunakan 12 ruang kelas, maka dapat menampung 480 siswa. Pada kenyataannya penggunaan ruang kelas hanya

sebesar 215 siswa atau belum didayagunakan secara maksimal, karena hanya mencapai 44,70% belum ada separuh. Dengan demikian, dari 3 jenjang pendidikan yang ada, berarti yang paling baik adalah SD dan paling buruk adalah SM.

R-S/G pada kenyataannya juga bervariasi dari 1:18 di SMP sampai 1:28 di SD dan rata-rata rasionya di dikdasmen sebesar 23. Hal ini dapat dimaklumi karena bidang studi di SM memang lebih banyak daripada SMP dan SD, yaitu guru kelas, sehingga paling kecil. Bila digunakan standar SD sebesar 18, SMP sebesar 12, dan SM sebesar 10 maka guru di semua jenjang sudah mencapai standar. Semua guru telah didayagunakan secara maksimal karena melebihi 100%, SD sebesar 154,22%, SMP sebesar 149,28% dan SM sebesar 186,85%.

Berdasarkan pada Permendiknas No.15/2010, R-S/K SD sebesar 28 sedangkan SMP dan SM sebesar 32. Pada kenyataannya, R-S/K di Kabupaten Nabire untuk SD sebesar 25, untuk SMP sebesar 32, dan untuk SM sebesar 33 sehingga rata-rata dikdasmen sebesar 27 siswa. SD menggunakan sistem kelas sehingga terlihat perbedaannya dengan tingkat SMP maupun SM. Dengan demikian, efisiensi penggunaan kelas di SD tercapai 88,48% atau belum maksimal. Efisiensi penggunaan kelas untuk SMP sebesar 98,60% mendekati maksimal dan SM telah maksimal sebesar 102,88%. Hal ini menunjukkan makin tinggi jenjang sekolah makin lebih efisien dan lebih padat dan telah di atas standar R-S/K.

R-K/RK di Kabupaten Nabire pada kenyataannya juga sangat bervariasi dari 0,80 di SMP sampai 1,16 di SD. Untuk SD terdapat 16,13% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali kegiatan belajar mengajar, sedangkan di SMP dan

SM masing-masing sebesar 19,59% dan 4,55% belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Khusus SMP dan SM, adanya ruang kelas yang belum digunakan dapat dimanfaatkan untuk menampung siswa agar partisipasi siswa bertambah, sehingga APK tingkat SMP dan SM akan meningkat. Untuk R-K/RK dikdasmen sebesar 1,05 ternyata masih terdapat 5,02% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk proses belajar-mengajar.

Misi K2 Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 5, keterjangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Nabire yang berasal dari TPS terbaik adalah SMP dan SM sebesar 49, sedangkan TPS terkecil yaitu SD sebesar 90. Hal ini berarti layanan pendidikan SD yang paling buruk, sedangkan SMP dan SM yang paling baik. Bila dilihat dari DT, maka SM sebesar 276 memiliki jangkauan terluas jika dibandingkan dengan jenjang yang lebih rendah, sedangkan SD sebesar 125 memiliki jangkauan terkecil. Keterjangkauan SB yang terbaik adalah SD sebesar Rp611.706,00 dan terbesar yaitu SM sebesar Rp1.028.316,00. Dengan demikian, keterjangkauan Dikdasmen dilihat dari biaya sebesar Rp762.942,00.

Misi K3 Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 6, %SBI TK ternyata hanya 50,90%. %GL tertinggi terdapat di SM sebesar 95,20% dan yang terkecil pada SD sebesar 8,25%. Hal yang sama untuk guru layak SMP, karena hanya mencapai 73,49% atau belum mencapai standar ideal. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru SD yang belum layak mengajar harus disetarakan dan merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Nabire. Namun, peningkatan mutu guru lainnya juga harus dilaksanakan karena %GL tertinggi di SM sebesar 95,20% juga belum mencapai ideal atau kurang dari 100%. Oleh karena itu, Kabupaten Nabire harus benar-benar memprioritaskan guru-gurunya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. %GL dikdasmen hanya tercapai 44,61% belum cukup tinggi, karena hanya mencapai kurang dari separuh guru yang ada. Dengan demikian, masih diperlukan penyetaraan sebesar 55,39% guru dikdasmen.

AL di Kabupaten Nabire yang terbesar terjadi di SM sebesar 96,44% dan terkecil pada SM sebesar 89,26%, sedangkan SMP sebesar 89,99%. Kecilnya AL di SMP dan SM perlu menjadi perhatian pihak pemerintah karena tidak mencapai

Tabel 5. Indikator Misi K2 Keterjangkauan Layanan Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	TPS	90	49	49	
2	DT	125	209	276	
3	SB	611,706	967,804	1,028,316	762,942

Tabel 6. Indikator Misi K3 Kualitas Layanan Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	%SB1 TK	50.90			
2	%GL	8.25	73.49	95.20	44.61
3	AL (%)	96.44	89.99	89.26	92.12
4	AU (%)	0.45	0.68	0.72	0.55
5	APS (%)	0.11	0.58	1.99	0.56
6	%Rkb	71.81	86.12	72.73	75.00
7	% Perpustakaan	34.00	56.25	37.93	39.13
8	% Komputer		34.38	44.83	39.34
9	% Laboratorium		75.00	20.69	30.51

90%. AU SD yang terbaik dengan nilai terkecil sebesar 0,45% dan yang terbesar SM sebesar 0,72% sedangkan SMP sebesar 0,68%. Sebaliknya, untuk APS SM yang terbesar sebesar 1,99%, sedangkan SD yang terbaik sebesar 0,11%. Dengan demikian, AL dikdasmen sebesar 92,12% sudah baik, AU Dikdasmen sebesar 0,55% dan APS Dikdasmen sebesar 0,56%.

Dalam rangka meningkatkan mutu prasarana pendidikan yang terdapat pada Tabel 8 diketahui %Rkb di SMP yang terbesar sebesar 86,12% dan terkecil di SD sebesar 71,81%. Untuk itu, prioritas rehabilitasi hendaknya dilakukan pada SD yang terkecil, kemudian SM dan SMP cukup baik, karena mencapai lebih dari 70%. %Rkb dikdasmen hanya mencapai 75,00% masih jauh dari 100%. Dengan demikian, diperlukan kepedulian pemerintah khususnya Kabupaten Nabire terhadap ruang kelas yang rusak berat agar segera diperbaiki.

Prasarana lainnya, yaitu perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium. %Perpus terbaik pada SMP sebesar 56,25% walau masih rendah dan terburuk pada SD sebesar 34,00%. Bila mutu SD harus sama dengan SMP dan SM, maka perlu kebijakan khusus dengan memberi prioritas pembangunan perpustakaan SD. %Rkom di SM sebesar 44,83% lebih baik daripada SMP sebesar 34,38%. Sebaliknya, %Lab SMP sebesar 75,00% lebih besar dari SM yang hanya sebesar 20,69%, artinya SM yang memiliki 5 laboratorium hanya sekitar 20,69% dari sekolah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian pemerintah, khususnya Kabupaten Nabire terhadap prasarana sekolah seperti perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium. Khusus SM agar segera direalisasikan pengadaannya sesuai dengan ketentuan bahwa SM memiliki 5 jenis laboratorium. Dengan demikian, untuk dikdasmen %perpus sebesar 39,13%, %Rkom sebesar 39,34%, dan %Lab sebesar 30,51%. Hal ini berarti peningkatan mutu prasarana di semua jenjang pendidikan

masih perlu diupayakan, karena hanya tercapai sekitar 30%.

Misi K4 Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 7, PG APK yang terbaik, yaitu SMP sebesar -14,49% yang berarti perempuan lebih baik daripada perempuan dan PG terburuk, yaitu SD sebesar -16,33%, karena makin jauh dari angka 0 dan perempuan lebih baik daripada laki-laki. Dengan demikian, PG untuk Dikdasmen juga masih kurang bagus sebesar -7,11% dan perempuan lebih baik dari laki-laki. Sesuai dengan PG maka IPG APK yang terbaik pada SD sebesar 1,10 walau juga belum seimbang, sedangkan SM makin jauh dari seimbang sebesar 0,81 yang berarti laki-laki lebih diuntungkan. Dengan demikian, IPG APK dikdasmen mencapai 1,06 yang berarti belum seimbang dan laki-laki lebih diuntungkan.

Jika dilihat dari kesetaraan dalam hal sekolah swasta dan negeri, maka kesetaraan di SM untuk memperoleh siswa sebesar 44,42% yang terbesar, sedangkan SMP yang terkecil sebesar 25,64%. Dengan demikian, %S-Swt Dikdasmen sebesar 31,28%.

Misi K5 Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 8 terdapat 4 jenis indikator kepastian layanan pendidikan. Untuk KE yang terbesar pada SD sebesar 99,46%; sedangkan yang terendah pada SM sebesar 94,53%. Dengan demikian, dikdasmen sebesar 97,32%. Hal yang sama dengan KE, ternyata AB5 SD sangat besar sebesar 99,38% sedangkan SM yang terkecil sebesar 97,42%. Dengan demikian, kondisi ketiga jenjang pendidikan dengan AB Dikdasmen sebesar 98,78%.

RLB SMP dan SM sebesar 3,02 tahun dan SD sebesar 6,02 tahun. RLB tingkat SD melebihi 6

Tabel 7. Indikator Misi K4 Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	PG APK	(16.33)	(14.49)	16.32	(7.11)
2	IPG APK	1.10	1.17	0.81	1.06
3	%S-Swt	28.99	25.64	44.42	31.28

Tabel 8. Indikator Misi K5 Kepastian Layanan Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	KE (%)	99.46	97.96	94.53	97.32
2	AB5/AB (%)	99.38	99.56	97.42	98.78
3	RLB	6.02	3.02	3.02	4.02
4	TML	6.03	3.06	3.21	4.10

tahun, karena siswa lulus tidak tepat waktu akibat adanya siswa yang mengulang. Dengan demikian, terdapat beberapa siswa yang lulus dalam waktu 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun. Hal yang sama dengan RLB, TML pada SD sebesar 6,03 tahun ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan SMP dan SM masing-masing sebesar 3,06 dan 3,21.

Indikator Misi Pendidikan 5K digunakan untuk menilai kinerja program pembangunan pendidikan. Indikator Misi K1 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan pendidikan yang dapat dicapai, indikator Misi K2 digunakan untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan yang dapat dicapai, indikator Misi K3 digunakan untuk menilai kualitas/mutu layanan pendidikan, indikator Misi

K4 digunakan untuk menilai kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan indikator Misi K5 digunakan untuk menilai kepastian layanan pendidikan. Gabungan dari kelima indikator tersebut untuk menilai kinerja program pembangunan pendidikan.

Indikator yang dapat dilakukan analisis untuk dikdasmen yaitu indikator yang dimiliki oleh ketiga jenjang tersebut disajikan pada Tabel 9. Untuk indikator Misi Pendidikan 5K maka indikator yang tidak digunakan dalam analisis adalah APM (Misi K1) karena sudah menggunakan APK, sehingga tidak terjadi duplikasi dan %SBTK (Misi K2) karena hanya untuk jenjang SD, sedangkan analisis ini untuk dikdasmen.

Tabel 9. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 5K Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

Misi	No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Misi K1	1	APK (%)	164.68	92.90	77.85	121.41
	2	AMM/AM (%)	78.20	110.77	144.66	
	3	Rasio S/Sek	205	194	215	205
	4	Rasio S/K	28	18	19	23
	5	Rasio S/G	25	32	33	27
	6	Rasio K/RK	1.16	0.80	0.95	1.05
Misi K2	1	TPS	90	49	49	
	2	DT	125	209	276	
	3	SB	611,706	967,804	1,028,316	762,942
Misi K3	1	%GL	8.25	73.49	95.20	44.61
	2	AL (%)	96.44	89.99	89.26	92.12
	3	AU (%)	0.45	0.68	0.72	0.55
	4	APS (%)	0.11	0.58	1.99	0.56
	5	%RKb	71.81	86.12	72.73	75.00
	6	%Perpustakaan	34.00	56.25	37.93	39.13
	7	%Komputer		34.38	44.83	39.34
	8	%Laboratorium		75.00	20.69	30.51
Misi K4	1	PG APK	(16.33)	(14.49)	16.32	(7.11)
	2	IPG APK	1.10	1.17	0.81	1.06
	3	%S-Swt	28.99	25.64	44.42	31.28
Misi K5	1	KE (%)	99.46	97.96	94.53	97.32
	2	AB5/AB (%)	99.38	99.56	97.42	98.78
	3	RLB	6.02	3.02	3.02	4.02
	4	TML	6.03	3.06	3.21	4.10

Dengan menggunakan standar pada Tabel 1 indikator misi K1 mengalami konversi yang terdapat pada Tabel 10, menunjukkan bahwa APK SD menjadi 100,00 berarti telah optimal, APK SMP menjadi 92,90, dan APK SM menjadi 77,85. Dengan demikian, dikdasmen menjadi 100,00 telah optimal. AMM SD dan AM SMP serta SM menjadi 100,00, sehingga dikdasmen menjadi 100,00 yang berarti telah optimal. R-S/Sek mengalami perubahan dengan nilai SM terkecil sebesar 44,70 dan nilai SD terbaik sebesar 85,48, sedangkan dikdasmen sebesar 61,38. R-S/G untuk semua jenjang pendidikan sudah maksimal sebesar 100,00 sehingga dikdasmen juga 100,00. R-S/K SM sudah maksimal sebesar 100,00 dan SD yang terkecil sebesar 88,48, sedangkan dikdasmen sebesar 95,70. R-K/RK terbaik adalah SM sebesar 95,45 dan terburuk adalah SMP, yaitu sebesar 80,41, sedangkan dikdasmen sebesar 87,32. Dengan demikian, untuk Misi K1 terdapat 3 indikator, yaitu APK, AMM/AM, dan R-S/G yang telah maksimal dan R-S/K kondisinya baik.

Seperti halnya misi K1, pada misi K2 setelah mengalami konversi menjadi terbaik adalah TPS SD sebesar 98,34, sedangkan terkecil adalah TPS SM sebesar 97,94 dan Dikdasmen sebesar 98,08. DT yang terbaik yaitu SD sebesar 74,15 dan terburuk adalah SM sebesar 71,77, sedangkan dikdasmen sebesar 72,84. SB di semua jenjang memiliki nilai 98, namun yang terbaik yaitu SMP sebesar 98,99 dan terkecil yaitu SM sebesar 98,83. Dengan demikian, SB dikdasmen sebesar 98,91 mendekati ideal, sehingga keterjangkauannya cukup bagus. Dengan demikian, untuk Misi K2 terdapat 2 indikator, yaitu TPS dan SB yang kondisinya bagus, karena lebih dari 95.

Indikator misi K3 untuk sumber daya manusia menunjukkan %GL terbaik yaitu SM sebesar 95,20 dan terburuk yaitu SD sebesar 8,25, sedangkan dikdasmen sebesar 44,61. Sebaliknya, AL terbaik yaitu SD sebesar 96,44 dan terburuk SM sebesar 89,26, sedangkan dikdasmen sebesar 92,12. AU terbaik yaitu SD sebesar 99,55 dan terkecil SM sebesar 98,01, sedangkan dikdasmen sebesar

Tabel 10. Nilai Indikator menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

Misi	No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Misi K1	1	APK (%)	100.00	92.90	77.85	100.00
	2	AMM/AM (%)	100.00	100.00	100.00	100.00
	3	Rasio S/Sek	85.48	53.96	44.70	61.38
	4	Rasio S/G	100.00	100.00	100.00	100.00
	5	Rasio S/K	88.48	98.60	100.00	95.70
	6	Rasio K/RK	86.11	80.41	95.45	87.32
Misi K2	1	TPS	98.34	97.96	97.94	98.08
	2	DT	74.15	72.60	71.77	72.84
	3	SB	98.91	98.99	98.83	98.91
Misi K3	1	%GL	8.25	73.49	95.20	44.61
	2	AL (%)	96.44	89.99	89.26	92.12
	3	AU (%)	99.55	99.32	99.28	99.45
	4	APS(%)	99.89	99.42	98.01	99.44
	5	%RKb	71.81	86.12	72.73	75.00
	6	% Perpustakaan	34.00	56.25	37.93	39.13
	7	% Komputer		34.38	44.83	39.34
	8	% Laboratorium		75.00	20.69	30.51
Misi K4	1	PG APK	83.67	85.51	83.68	92.89
	2	IPG APK	90.59	85.65	80.82	94.33
	3	%S-Swt	100.00	64.11	88.85	84.32
Misi K5	1	KE (%)	99.46	97.96	94.53	97.32
	2	AB5/AB (%)	99.38	99.56	97.42	98.78
	3	RLB	99.64	99.31	99.24	99.40
	4	TML	99.43	98.02	93.58	97.01

99,45 berarti telah mendekati ideal. APS terbaik adalah SD sebesar 99,89 dan terkecil adalah SM sebesar 98,01, sedangkan dikdasmen sebesar 99,44 juga telah mendekati ideal. Dengan demikian, untuk misi K3 terdapat 2 indikator, yaitu AU dan APS kondisinya bagus, karena telah mendekati ideal.

Bila dilihat dari prasarana pendidikan, maka %Rkb terbaik adalah SMP sebesar 86,12 dan terburuk, yaitu SD sebesar 71,81, sedangkan dikdasmen sebesar 75,00. Sebaliknya, untuk %Perpus terbaik yaitu SMP sebesar 86,12 dan terburuk adalah SD sebesar 34,00, sedangkan dikdasmen sebesar 39,13%. Untuk %Rkom SM sebesar 44,83 lebih besar daripada SMP sebesar 34,38, sedangkan dikdasmen sebesar 39,34. Sebaliknya, %Lab di SMP sebesar 75,00 lebih besar daripada SM sebesar 20,69, karena hanya sekitar 20,69% sekolah yang memiliki 5 jenis laboratorium yang dipersyaratkan, sedangkan dikdasmen sebesar 30,51.

Indikator Misi K4, PG APK yang terbaik, yaitu SMP sebesar 85,51 dan APK SD yang terburuk sebesar 83,67, sedangkan dikdasmen sebesar 92,89. Sebaliknya, IPG APK SD yang terbaik sebesar 90,59 dan terburuk adalah SD sebesar 80,82 dengan dikdasmen sebesar 94,33. %S-Swt terbaik adalah SD sebesar 100 telah optimal dan terkecil adalah SMP sebesar 64,11, sedangkan dikdasmen sebesar 84,32. Dengan demikian, untuk Misi K4 tidak terdapat indikator yang mendekati ideal.

Indikator Misi K5, KE terbaik, yaitu SD sebesar 99,46 mendekati optimal dan terkecil SM sebesar 94,53, sedangkan dikdasmen sebesar 97,32. AB yang terbaik adalah SMP sebesar 99,56 dan SM terkecil sebesar 97,42, sedangkan dikdasmen sebesar 98,78. RLB terbaik adalah SD sebesar

99,64 dan terkecil adalah SM sebesar 99,24, sedangkan dikdasmen sebesar 99,40. TML terbaik adalah SD sebesar 99,43 dan terkecil adalah SM sebesar 93,58, sedangkan dikdasmen sebesar 97,01. Dengan demikian, untuk Misi K5 semua indikatornya mendekati ideal.

Ketercapaian Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan 5K

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa untuk misi K1, yaitu ketersediaan layanan pendidikan menunjukkan bahwa di SD yang terbaik sebesar 93,34 dan yang terburuk yaitu SM sebesar 86,33, sehingga untuk layanan dikdasmen tercapai sebesar 90,73 termasuk kategori utama. Untuk misi K2, maka keterjangkauan SD yang terbaik sebesar 90,47 dan terburuk yaitu SM sebesar 89,51 sehingga dikdasmen tercapai sebesar 89,94 termasuk kategori madya. Untuk misi K3, menunjukkan kualitas SMP yang terbaik sebesar 76,75 dan SD yang terburuk sebesar 68,32, sehingga untuk layanan dikdasmen tercapai sebesar 64,95 termasuk kategori kurang. Untuk misi K4, yaitu kesetaraan menunjukkan bahwa SD yang terbaik sebesar 99,48 dan terburuk yaitu SM sebesar 96,19 sehingga kesetaraan dikdasmen tercapai sebesar 90,51 termasuk kategori utama. Untuk misi K5, menunjukkan bahwa kepastian yaitu SD yang terbaik sebesar 99,48 dan terkecil yaitu SM sebesar 96,19, sehingga untuk dikdasmen tercapai sebesar 98,13 termasuk kategori madya. Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka SD tidak mempunyai 4 nilai terbaik pada Misi K1, K2, K4, dan K5, tetapi SMP mempunyai nilai terbaik untuk Misi K3, sedangkan SM tidak ada yang mempunyai nilai terbaik.

Dengan mengambil rata-rata Misi Pendidikan 5K, diperoleh kinerja pendidikan menurut jenjang

Tabel 11. Nilai Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Kabupaten Nabire, Tahun 2010/2011

Misi	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
Misi K1	93.34	87.65	86.33	90.73	Utama
Misi K2	90.47	89.85	89.51	89.94	Madya
Misi K3	68.32	76.75	69.74	64.95	Kurang
Misi K4	91.42	78.42	84.45	90.51	Utama
Misi K5	99.48	98.71	96.19	98.13	Paripurna
Kinerja	88.61	86.28	85.25	86.85	Madya
Jenis	Madya	Madya	Madya	Madya	

pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa SD yang terbaik sebesar 88,61 berarti termasuk kategori madya dan terburuk adalah SM sebesar 85,25, juga termasuk kategori madya, sehingga untuk dikdasmen tercapai sebesar 88,85 yang juga termasuk madya dan SMP sebesar 86,28 berarti termasuk madya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil indikator pendidikan berdasarkan Misi 5K Kabupaten Nabire, dapat disimpulkan bahwa misi K5 kepastian layanan pendidikan di semua satuan pendidikan SD, SMP, dan SM yang terbaik dengan nilai dikdasmen sebesar 98,13, hal ini berarti menunjukkan kinerjanya sudah paripurna. Sebaliknya, Misi K3 dikdasmen yang terburuk sebesar 64,95 berarti termasuk kurang bila dibandingkan Misi K lainnya. Misi K3 untuk tiap jenjang juga dalam kategori kurang dengan nilai SD yang terburuk sebesar 68,32, SMP sebesar 76,75 dan SM sebesar 69,74. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa ketercapaian pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K kabupaten Nabire dengan kinerja terbaik untuk semua satuan pendidikan yaitu sama dalam kategori madya dengan SD sebesar 88,61, SMP sebesar 86,28 dan SM sebesar 85,25.

Dengan demikian, ketercapaian pendidikan dikdasmen Kabupaten Nabire berada pada kinerja madya.

Saran

Walaupun kondisi kinerja pendidikan Kabupaten Nabire pada kategori madya, namun Misi K3 masih perlu ditingkatkan karena hanya tercapai masing-masing 68,32, 76,75, dan 69,74 termasuk kinerja kurang. Untuk itu, disarankan agar untuk SD, %GL SD sangat perlu ditingkatkan dengan melaksanakan penyetaraan guru, %Rkb SD perlu ditingkatkan dengan melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, dan %Perpus perlu ditingkatkan dengan pengadaan pembangunan perpustakaan. Untuk SMP maka %GL SMP juga perlu ditingkatkan dengan melaksanakan penyetaraan guru, AL perlu ditingkatkan dengan penambahan materi yang di-UN-kan dalam ekstrakurikuler, %Perpus, %Rkom, dan %Lab SMP perlu ditingkatkan melalui pembangunan perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium. Untuk SM, AL perlu ditingkatkan dengan penambahan materi yang di-UN-kan dalam ekstrakurikuler, %Rkb perlu ditingkatkan melalui rehabilitasi, %Rkomp, dan %Lab perlu ditingkatkan dengan pembangunan perpustakaan, ruang komputer, dan laboratorium.

Pustaka Acuan

Anonim, <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/tentang-kemdikbud-visi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2012

Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Nabire dalam Angka 2010*, Nabire

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977 tentang Kordinasi Pengolahan Data di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. 2010. DPA SKPD Kabupaten Nabire Tahun 2010 (tidak diterbitkan)

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010a. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta.

Ida Kintamani Dewi Hermawan, Ketercapaian Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Misi Pendidikan 5k: Kasus Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2010/2011

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010b. Peraturan Mendiknas Nomor 15, Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta

Pusat Statistik Pendidikan. 2010. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, Tahun 2009/2010. Jakarta

Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2011a. Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010/2011 Buku 3. Jakarta.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2011b. APK/APM TK, SD, SMP, SM, dan PT 2010/2011. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal.